

## Evolusi Pemikiran Politik Islam: Kajian Pustaka dari Khulafaur Rasyidin hingga Era Kontemporer

Ismail Sa'bani<sup>1\*</sup> & Faisal Attamimi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Agama Islam

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Ismail sa'bani, E-mail: [jiwabijak@gmail.com](mailto:jiwabijak@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

Volume: 4

### KATAKUNCI:

Pemikiran Politik Islam, Khilafah, Demokrasi Islam, Ulama, Teokrasi, Maqashid Syariah.

### ABSTRAK

Artikel ini membahas evolusi pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer, dengan fokus pada dinamika teoritis, historis, dan kontekstual yang membentuk arah dan corak pemikiran tersebut. Pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin menekankan prinsip syura (musyawarah) dan kepemimpinan berbasis nilai-nilai kenabian. Pada periode klasik, terjadi transformasi menuju sistem monarki dinasti serta munculnya teori-teori politik dari para ulama dan filsuf seperti Al-Mawardi dan Al-Farabi. Periode pertengahan memperlihatkan peran signifikan ulama dan sufisme dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan etika, serta memperkaya pemikiran melalui interaksi dengan tradisi intelektual Barat. Di era kontemporer, pemikiran politik Islam menunjukkan kecenderungan reformasi dengan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual, seiring dengan meningkatnya wacana demokrasi Islam dan respons terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia dan pluralisme. Studi ini menegaskan bahwa pemikiran politik Islam bukan entitas statis, melainkan diskursus yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan tantangan zaman.

### 1. Pendahuluan

Pemikiran politik dalam Islam memiliki peran yang signifikan, terutama dalam konteks sosial dan politik yang berkembang di dunia Muslim saat ini. Manfaat pemikiran politik Islam terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan aspek praktis kehidupan bernegara. Hal ini penting untuk membimbing umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sambil tetap berpijak pada prinsip syariah dan etika moral. Menurut Nashir, pemikiran politik Islam kontemporer berhubungan erat dengan isu-isu modern seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi, yang menjadikannya relevan dalam konteks politik masa kini. Dengan demikian, pemikiran ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional, tetapi juga beradaptasi dengan tuntutan zaman yang kian berubah. Dinamika pemikiran politik Islam selama bertahun-tahun menunjukkan evolusi yang mencolok, mulai dari pemikiran klasik yang berfokus pada khilafah dan otoritas agama, sampai pada wacana modern yang lebih kompleks dan plural. Banyak pemikir seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengembangkan ide-ide yang menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Penelitian oleh Mastori menyoroti bagaimana pendekatan dakwah dapat membangun kembali peradaban Islam melalui kesadaran politik kolektif. Artikel tersebut juga menggarisbawahi bahwa perjuangan dalam konteks ini tidak dapat dipisahkan dari aspek politik, yang berfungsi sebagai penjaga peradaban. Urgensi penelitian mengenai pemikiran politik Islam secara historis dan konseptual tidak dapat diabaikan. Memahami evolusi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana ide-ide politik di dalam Islam terbentuk dan beradaptasi terhadap tantangan zaman. Iqtidar menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam tidak terjebak dalam dichotomi tradisi versus modernitas, melainkan melibatkan pemikiran yang berkelanjutan yang bisa diadaptasi sesuai kebutuhan sosial-

\* *Ismail Sa'bani Mahasiswa Program Studi PAI UIN Datokarama Palu.* Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

politis masyarakat. Dinamika perkembangan pemikiran politik Islam mengalami transformasi yang signifikan sejak masa klasik hingga era modern. Pada masa klasik, pemikiran politik Islam sangat terhubung dengan fase awal Islam di zaman Nabi Muhammad dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Khulafa Al-Rasyidun. Pemikiran politik pada masa ini berfokus pada pembentukan sistem pemerintahan yang adil dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, di mana moralitas dan kepemimpinan sangat ditekankan. Memasuki masa pertengahan, pemikiran politik Islam lebih berfokus pada pengembangan hukum Islam dengan mengambil inspirasi dari konteks sosial dan politik pada waktu itu. *Ijma'* (konsensus ulama) dan *Qiyas* (analogi hukum) menjadi instrumen kunci dalam memperluas cakupan hukum Islam untuk menanggapi perubahan keadaan. Banyak pemikir Muslim dari berbagai lapisan masyarakat dan mazhab menganalisis dan mengembangkan teori-teori tentang kepemimpinan dan sistem pemerintahan, menegaskan perlunya keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Dari era modern, pemikiran politik Islam beradaptasi dengan tantangan baru yang dihadapi umat Islam, termasuk interaksi dengan ide-ide Barat dan dinamika globalisasi. Perkembangan pemikiran ini meliputi pembaruan yang penting, di mana intelektual Muslim mengadopsi dan mengkritisi perspektif luar sambil tetap berpijak pada prinsip-prinsip Islam. Relasi antara Islam dan politik dalam sejarah nasional Indonesia juga mencerminkan bagaimana pemikiran ini berkembang sejalan dengan perjuangan politik, pengaruh penjajahan, dan kebangkitan nasionalisme. Deliar Noer menekankan bahwa gerakan Islam modern di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi para ulama dengan pemikiran-pemikiran keislaman dan akademis yang berkembang. Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan, metode kajian kepustakaan sering dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, baik dari buku klasik maupun modern, artikel jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Metode ini memfokuskan pada pengumpulan informasi yang kaya dan kontekstual. Menurut Fadli, penelitian ini berupaya mengungkap fenomena sosial secara holistik dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam konteks alamiah. Dalam konteks ini, analisis konten merupakan teknik penting yang dapat digunakan untuk menggali makna dari teks yang ada. Hsieh dan Shannon menjelaskan tiga pendekatan dalam analisis isi: konvensional, terarah, dan summatif, yang masing-masing memiliki kegunaan dalam menginterpretasikan makna dari data teks.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.1 Periode Khulafaur Rasyidin: Pemikiran politik berbasis pada nilai-nilai kenabian dan syura.**

Periode Khulafaur Rasyidin merupakan fase penting dalam sejarah politik Islam yang ditandai dengan kepemimpinan empat sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Abu Bakr Ash-Siddiq, Umar bin Khatab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib. Pemikiran politik yang berkembang pada masa ini berbasiskan prinsip-prinsip syura (musyawarah) dan nilai-nilai kenabian, yang menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan politik. Menurut Fajriah dan Harefa, kebijakan ekonomi selama masa Khulafaur Rasyidin juga menggambarkan keadilan dan kepemimpinan yang adil, mencerminkan implementasi ajaran Nabi dalam konteks pemerintahan. Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam memengaruhi model pemerintahan mereka. Dalam konteks kepemimpinan, pendidikan politik yang ditanamkan kepada generasi muda menjadi aspek penting agar nilai-nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dapat terus diwariskan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al. menyoroti pentingnya pendidikan politik berbasis nilai-nilai ini untuk mendorong jiwa kepemimpinan yang baik dalam era digital. Pemanfaatan media seperti e-book dan video pembelajaran yang mengangkat kisah-kisah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ini pada siswa, menciptakan generasi yang memahami dan dapat menerapkan prinsip syura dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, strategi pengajaran yang efektif harus mampu menyentuh aspek-aspek nilai karakter yang diajarkan oleh para khalifah ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Aeni, pemanfaatan video pembelajaran untuk menyampaikan kisah para pemimpin ini tidak hanya membuat siswa lebih terlibat tetapi juga membantu mereka memahami relevansi kekhalifahan dalam konteks pendidikan politik Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan nilai-nilai kenabian berperan penting dalam pembentukan karakter pelajar sesuai dengan prinsip dasar ajaran dalam tradisi Islam. Selanjutnya, pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut dalam konteks modern seringkali diangkat oleh berbagai penelitian. Sebagai contoh, Zebua et al. menjelaskan bahwa pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di era kontemporer, menegaskan pentingnya menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang berbasis kenabian dalam proses pendidikan saat ini. Dengan kata lain, generasi masa kini ditantang untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam situasi politik dan sosial yang kompleks, dengan tetap berpegang pada etika dan moral yang telah ditanamkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian, pemikiran politik yang berpijak pada nilai-nilai kenabian dan syura pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya memiliki relevansi historis, namun juga terus berlanjut hingga kini, di mana generasi muda perlu dibekali dengan pengetahuan dan sikap yang mencerminkan kepemimpinan yang baik dalam konteks zaman yang sedang berubah.

### **2.2 Periode Klasik: Perubahan model kekuasaan menjadi monarki dinasti.**

Dalam periode Klasik, terjadi transformasi penting dalam struktur kekuasaan yang berpindah dari sistem pemerintahan yang bersifat kolektif menjadi monarki dinasti. Hal ini dimulai dengan munculnya Dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 661 hingga 750 M. Usaha Muawiyah ibn Abu Sufyan dalam mendirikan kekuasaan dinasti ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik yang sebelumnya mungkin tidak tercapai pada periode Khulafaur Rasyidin, di mana pemilihan pemimpin dilakukan melalui musyawarah. Ketika Muawiyah mengambil alih kekuasaan, beliau memanfaatkan posisi serta statusnya untuk mengalihkan sistem pemerintahan ke arah monarki absolut, yang merupakan langkah signifikan pertama dalam perubahan model kekuasaan dalam pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, kekuasaan menjadi terpusat dan diwariskan secara turun temurun. Hal ini menciptakan sebuah sistem yang mengutamakan garis keturunan daripada mekanisme pemilihan berbasis kesepakatan masyarakat. Model ini kemudian diteruskan dan diperkuat oleh Dinasti Abbasiyah, yang mengambil alih pada tahun 750, di mana Khalifah Abbasiyah memiliki kekuasaan yang sama absolutnya dan menjadi pusat otoritas dalam membentuk kebijakan publik serta penegakan hukum. Pemikiran politik pada masa ini juga didorong oleh kontribusi para intelektual dan cendekiawan, yang merumuskan banyak teori politik yang mendukung legitimasi kekuasaan monarki, mengedepankan konsep bahwa pemimpin harus mempertanggungjawabkan kekuasaan mereka kepada masyarakat dan mengikuti nilai-nilai syariat. Sebagai kesimpulan, periode Klasik dalam sejarah Islam adalah masa transisi dari sistem pemerintahan yang lebih demokratis, mendekati model kolektif, ke monarki dinasti yang menjadi ciri khas pemerintahan Islam selanjutnya. Transformasi ini tidak hanya mengubah struktur kekuasaan tetapi juga berkontribusi pada perkembangan teori politik yang berakar dari tradisi Islam, yang hingga kini mempengaruhi struktur pemerintahan di berbagai negara Muslim. Periode klasik dalam sejarah pemikiran politik Islam merupakan fase yang penting di mana para ulama dan filosof merumuskan berbagai teori mengenai politik. Salah satu tokoh yang menonjol dalam konteks ini adalah Raja Ali Haji, yang aktif dalam menulis dan mempraktikkan pemikiran politik. Menurut Lazim, pemikiran politik Raja Ali Haji dipengaruhi oleh tradisi intelektual dari ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Mawardi, sehingga corak pemikirannya mengedepankan etika dalam pemerintahan. Dengan penekanan pada legitimasi hukum dan moralitas, teori-teori yang dihasilkan menjadi fondasi bagi pengelolaan kekuasaan yang berlandaskan prinsip Islam. Dalam tradisi pemikiran ini, hubungan antara agama dan negara menjadi sorotan. Yusuf al-Qardhawy, sebagai seorang ulama kontemporer, telah berbicara tentang interaksi antara teologi dan politik, mengusulkan bahwa moralitas harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, formula politik kenegaraan yang diajukan oleh Qardhawy menunjukkan keterkaitan dengan pemikiran para ulama klasik, menekankan pentingnya integritas moral dalam tindakan pemerintahan. Selanjutnya, pengaruh signifikan dari filsafat Al-Farabi dan Ibn Khaldun juga turut membentuk pemikiran politik pada periode ini, di mana masing-masing memberikan kontribusi berbeda dalam memikirkan struktur masyarakat dan kekuasaan. Pemikiran Ibn Khaldun mengenai 'asabiyyah atau solidaritas sosial menjadi relevan dalam memahami dinamika kepemimpinan dan stabilitas politik. Hal ini menggambarkan bagaimana teori politik masa klasik tidak hanya terbatas pada aspek legal formal tetapi juga aspek sosial yang melibatkan ketersediaan solidaritas komunitas. Pengembangan konsep maqashid syari'ah berperan penting dalam perumusan teori politik. Konsep tersebut, yang berfokus pada tujuan syariah dalam melindungi kepentingan umat, memberikan panduan etis bagi penguasa dalam kebijakan publik. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa tidak hanya syariat yang mengatur tindakan individu, tetapi juga menggarisbawahi bagaimana penguasa seharusnya berperilaku dalam konteks publik, mendorong terciptanya kemaslahatan umum.

### ***2.3 Periode Pertengahan: Munculnya teori legitimasi kekuasaan dan peran ulama sebagai penyeimbang.***

Periode Pertengahan dalam sejarah Islam menyaksikan munculnya berbagai teori legitimasi kekuasaan yang kompleks, sekaligus penguatan peran ulama sebagai penyeimbang dalam struktur sosial dan politik. Ini adalah waktu di mana terdapat interaksi yang intens antara kekuasaan politik dan keagamaan, di mana ulama berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Salah satu aspek penting dari legitimasi kekuasaan dalam konteks ini adalah apakah kekuasaan tersebut mencapai persetujuan rakyat melalui mekanisme yang sah atau apakah ia didasarkan pada kekuatan semata. Novita Anisa menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan menjadi inti dalam pembentukan struktur pemerintahan yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, peran ulama sangat krusial karena mereka mampu memberikan justifikasi agama terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa, sehingga meningkatkan keabsahan pemerintahan di mata masyarakat. Sementara itu, ulama juga berfungsi sebagai kritikus terhadap kebijakan pemerintah. Novita Anisa menjelaskan bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi dan mengontrol tindakan penguasa serta memberikan nasihat berdasarkan ajaran Islam. Dalam hal ini, mereka dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang penting, mencegah kekuasaan dari penyalahgunaan dan memberikan saran-saran yang sejalan dengan etika dan moralitas. Teori legitimasi kekuasaan dalam periode ini juga mencakup pemahaman bahwa kekuasaan tidak hanya harus berbasis pada hukum positif tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Gustav Sampurno menekankan perlunya dialog antara argumen hukum dan moral dalam legitimasi kekuasaan. Dengan pendekatan

ini, ulama tidak hanya diharapkan untuk mendukung penguasa, tetapi juga bertindak sebagai katalis untuk reformasi, yang menciptakan asas legitimasi berdasarkan konsensus.

#### **2.4 Analisis Evolusi: Perpindahan paradigma dari teosentris ke pendekatan lebih kontekstual dan rasional.**

Evolusi pemikiran politik dalam tradisi Islam telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan teosentris yang mendominasi ke pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional. Pergeseran ini mencerminkan adaptasi dan respons intelektual terhadap tantangan global dan perubahan sosial yang kompleks. Pada masa teosentris, pemikiran politik Islam didasarkan pada teks-teks suci dan otoritas agama. Sebagai contoh, literatur dalam mazhab Hanafi, seperti yang diungkapkan oleh Karimullah dan Sugitanata, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosio-kultural dan politik dalam membentuk pemahaman hukum Islam yang rasional. Disiplin ini berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai teologis yang mengatur kehidupan sosial dan politik. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan adaptasi terhadap modernitas, pendekatan yang lebih kontekstual mulai muncul. Huringiin menyatakan bahwa pemikiran Bediuzzaman Said Nursi menekankan pentingnya harmonisasi sosial dan politik yang merespons tantangan kontemporer tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan paradigma politik yang tidak hanya menghargai teologi, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial di mana ide-ide tersebut diterapkan.

Kita juga melihat bahwa pemikir-pemikir seperti Al-Mawardi memberikan landasan bagi penerapan hukum Islam dalam pemerintahan yang lebih adaptif. Hanif Mustofa mencatat relevansi ajaran Al-Mawardi dalam diskursus modern tentang nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia yang berintegrasi dengan etika Islam. Dengan penekanan pada adaptabilitas, ajaran ini memperlihatkan pergeseran dari pandangan yang statis menuju pandangan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, konsep maslahat (kemaslahatan) dan maqashid al-shariah (tujuan hukum Islam) semakin digunakan untuk membenarkan reformasi dalam politik. Fadel Sampurno menyoroti bagaimana para reformis Muslim modern menggunakan salah satu dari dua konsep tersebut untuk mendukung prakarsa-prakarsa reformasi, mengaitkan pengertian dengan kesejahteraan umum alih-alih kepatuhan buta terhadap teks-teks tradisional. Ini menunjukkan bahwa pemikir Muslim kini lebih berfokus pada hasil sosial dari praktik politik dan hukum, daripada sekadar menyandarkan pada doktrin teologis yang ketat. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini terlihat jelas dalam interaksi antara Islam politik dan budaya modern yang lebih sekuler. Azra Noor menunjukkan bagaimana konflik antara wajah politik Islam dan Islam kultural berperan dalam tampilan kesadaran kolektif masyarakat. Di satu sisi, ada keinginan untuk menegakkan syariah sebagai bagian dari identitas politik Islam, tetapi di sisi lain ada juga upaya untuk meningkatkan nilai-nilai budaya yang lebih inklusif dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

### **3. Kesimpulan**

Pemikiran politik Islam telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa klasik hingga kontemporer. Pada masa Khulafaur Rasyidin, politik Islam berakar pada nilai-nilai kenabian, syura (musyawarah), dan kepemimpinan moral. Periode ini ditandai dengan kepemimpinan kolektif dan akuntabilitas yang tinggi. Selanjutnya, pada periode klasik (Dinasti Umayyah dan Abbasiyah), terjadi transformasi menuju monarki dinasti dan lahirnya teori-teori politik dari ulama dan filsuf seperti Al-Mawardi dan Al-Farabi, yang menekankan pentingnya keadilan, legitimasi kekuasaan, dan peran moral pemimpin. Memasuki masa pertengahan, pemikiran politik Islam semakin kompleks dengan keterlibatan ulama sebagai penyeimbang kekuasaan, peran sufisme dalam mengedepankan etika politik, serta interaksi dengan pemikiran Barat yang memperkaya wacana Islam politik. Dalam era kontemporer, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan teosentris menuju pendekatan kontekstual dan rasional. Tokoh-tokoh seperti Rashid Rida, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Maududi mengusulkan integrasi nilai-nilai Islam dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan tantangan global modern. Wacana tentang demokrasi Islam dan negara Islam mencerminkan dinamika hubungan antara agama, negara, dan masyarakat dalam konteks globalisasi. Secara keseluruhan, evolusi pemikiran politik Islam menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual membuka ruang bagi dialog antara tradisi dan modernitas, serta membentuk fondasi bagi pengembangan tata kelola politik yang adil, etis, dan relevan bagi masyarakat Muslim masa kini.

### **Referensi**

- Adekoya, Clement O, 'Research Collaboration Among Library and Information Science Professionals in Nigerian Universities', *Library Management*, 44.8/9 (2023), pp. 536–45, doi:10.1108/lm-07-2023-0062
- Aeni, Ani N, and others, 'Pemanfaatan Video Pembelajaran "Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin" Sebagai Media Pembelajaran Politik Islam Siswa SD', *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6.4 (2022), p. 979, doi:10.35931/am.v6i4.1097
- Ahadiya, Ikrima A, 'Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer', *Politea Jurnal Politik*
- Anisa, Anisa, 'Vernakularitas Arsitektur Peninggalan Peradaban Islam', *Nalars*, 20.2 (2021), p. 137, doi:10.24853/nalars.20.2.137-146
- Anugraheny, Rahma, Muakibatul Hasanah, and Wahyudi Siswanto, 'Bahan Ajar Menulis Cerita Pendek Bermuatan Nilai-Nilai Kenabian Untuk Siswa MTs Kelas VII', *Jurnal Pendidikan Teori Penelitian Dan Pengembangan*, 4.2 (2019), p. 206, doi:10.17977/jptpp.v4i2.11985
- Effendy, Rochmad, and others, 'Mengglobalkan Makanan Tradisional Lewat Media Sosial Youtube Sebagai Budaya Tandingan (Studi Food Vlogger Nex Carlos Sebagai Media Promosi Kuliner Lokal)', *Jurnal Nomosleca*, 7.2 (2021), doi:10.26905/nomosleca.v7i2.6581
- Fadli, Muhammad R, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), pp. 33–54, doi:10.21831/hum.v21i1.38075
- Faidi, Ahmad, 'Kekuasaan Politik Islam Di Andalusia: Pintu Gerbang Menuju Renaissance Eropa', *Al-Ijtima`i International Journal of Government and Social Science*, 6.2 (2021), pp. 127–38, doi:10.22373/jai.v6i2.834
- Fajriah, Rizky N, and Primoadin harefa, 'Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam Masa Khulafah Rasyidin', 2022, doi:10.31219/osf.io/baocr
- Fardani, Diah N, 'Pengaruh Pemikiran-Pemikiran Ulama Islam Pada Dinasti Abbasiyah Terhadap Kemajuan Islam Di Era Modern', *Isedu*, 2.1 (2024), pp. 22–31, doi:10.59966/isedu.v2i1.904
- Farooq, Mohammad O, 'Islam and Democracy: Perceptions and Misperceptions', *SSRN Electronic Journal*, 2011, doi:10.2139/ssrn.1772541
- Febriyani, Nur I, and Mukh Nursikin, 'Konsep Pendidikan Karakter Menurut Hasan Al-Banna Dan Ibnu Miskawih', *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4.6 (2024), pp. 507–17, doi:10.59188/journalsosains.v4i6.1400
- Fithriyyah, Mustiqowati U, 'Revitalisasi Partai Politik Dalam Penegakan Negara Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal El-Riyasah*, 3.1 (2012), p. 20, doi:10.24014/jel.v3i1.661
- Habibah, Nor, 'Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Masa Kenabian', *Edu-Riligia Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 6.3 (2022), doi:10.47006/er.v6i3.13231
- Hambali, R Y A, and Leonardus Samosir, 'Liberal Islamic Thoughts in Indonesia', *Focus*, 3.1 (2022), pp. 32–42, doi:10.26593/focus.v3i1.5843
- Hamzah, Saidin, and Kurais, 'Khilafah Dan Kerajaan Dalam Perspektif Abu A'la Al-Maududi (Analisis Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam)', *Ittihad*, 10.2 (2024), pp. 51–66, doi:10.61817/ittihad.v10i2.212
- Hasyim, Syafiq, 'Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam', *Trans Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8.1 (2019), pp. 21–35, doi:10.1017/trn.2019.13
- Hidayat, Mohammad A, 'Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Sistem Pemerintah Dan Ilmu Tasawuf Pada Dinasti Abbasiyah', *Jurnal Keislaman*, 5.2 (2022), pp. 230–37, doi:10.54298/jk.v5i2.3488
- Hidayatulloh, Taufik, 'Navigating Contemporary Islamic Reason: An Epistemological Analysis of Mohammed Arkoun', *Jurnal Pemikiran Islam*, 4.1 (2024), p. 1, doi:10.22373/jpi.v4i1.23080
- Horstmann, Wolfram, and Michael Witt, 'Libraries Tackle the Challenge of Research Data Management', *Ifla Journal*, 43.1 (2017), pp. 3–4, doi:10.1177/0340035216688787
- Hsieh, Hsiu-Fang, and Sarah E Shannon, 'Three Approaches to Qualitative Content Analysis', *Qualitative Health Research*, 15.9 (2005), pp. 1277–88, doi:10.1177/1049732305276687
- Huringiin, Nabila, Achmad Reza Hutama Al Faruqi, and Achmad W S Bachr, 'Harmonizing Society: Bediuzzaman Said Nursi's Vision of Islamic Politics', *Muharrrik Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 6.2 (2023), pp. 191–200, doi:10.37680/muharrrik.v6i2.3528
- Indriasari, Devi T, and Karman Karman, 'Association of Political Candidates and Ulamas During the 2019 Election on Twitter', *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 7.3 (2023), pp. 779–96, doi:10.25139/jsk.v7i3.5659
- Mashudi, Mashudi, 'Reformulasi Hubungan Agama Dengan Negara: Dialog Pemikiran Yusuf Al-Qardhawiy Dengan Ulama Klasik Tentang Politik Kenegaraan Dan Implikasinya Bagi Perpolitikan Di Indonesia', *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22.1 (2014), p. 211, doi:10.21580/ws.2014.22.1.265

- Indonesia', *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 24.1 (2024), doi:10.15408/ajis.v24i1.33155
- Umar, Umar, 'Pemikiran Politik Era Kenabian, Sahabat Dan Sekte-Sekte Islam: Tinjauan Sketsa Historisitas', *Jurnal Mimbar Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 1.1 (2015), pp. 214–39, doi:10.47435/mimbar.v1i1.284
- Warwick, Jon, 'On 40 Years of Queuing in Libraries', *Library Review*, 58.1 (2009), pp. 44–55, doi:10.1108/00242530910928924
- Yahya, Imam, and Sahidin Sahidin, 'Relation of Religion and Practical Politics: Contextual Adoption of Constitutional Islamic Jurisprudence for Muslim Clerics in Indonesia', *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78.4 (2022), doi:10.4102/hts.v78i1.7405
- Zebua, Rony S Y, Miftahul Ihsan, and Neneng Nurjanah, 'Perkembangan Pendidikan Islam Pada Periode Khulafaur Rāsyidīn Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5.1 (2020), pp. 115–26, doi:10.35316/jpii.v5i1.228